

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca New York: Cornell University Press, 2003.
- Firdaus, Muhammad Syafari, Atikah Nuraini, Kurniasari Novita Dewi, Roichatul Aswidah, Sasanti Amisani, Eko Dahana, dan J. Nunik Widianti. *Pembangunan berbasis hak asasi manusia: sebuah panduan*. Jakarta: KOMNAS HAM, 2013.
- Henkin, Louis. *The Rights of Man Today*. Colorado: Westview Press, 1988.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. *Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998.
- Perangin, Effendi. *Praktik Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rashid, Harun Al. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Salman, H.R.O. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*.

- Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Smith, Rhona K.M., Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, dan Rudo M. Rizki. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharno. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press, 2010.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sukma, Devani. *Tata Kelola yang Baik (Good Governance)*. BPJS Kesehatan, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Thabrany, Hasbullah. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Jakarta Cerdas Pustaka, 2008.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.

B. JURNAL

- Abidin, Zainal. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Makalah Pelatihan HAM Bagi Panitia RANHAM* 1, no. 1 (2013).
- Adiyanta, F.C Susila. "Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020).
- Amboro, F. Yudhi Priyo, dan Elviani. "Pendampingan Prosedur Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah Hasil Jual-Beli Di Badan Pertanahan Nasional Melalui Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, Sh., M.Kn." *Conference on Community Engagement Project* 1, no. 1 (2021).

- Arifin, Ridwan, dan Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, No. 2 (2019).
- Aristiawati, Ayu K, dan Mukhanet W Nugroho. "Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli." *Rechtenstudent Journal* 3, no. 1 (2022).
- Deliana, Evi, dan Hayatul Ismi. "Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Sebagai Peserta Asuransi Oleh Pt. Askes (Persero) Di Pekanbaru." *Lembaga Penelitian* 1, no. 11 (2005).
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016).
- Endang, Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022).
- Firdaus, Insan. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia." *Jurnal HAM* 5, no. 2 (2014).
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A Komari, Muhammad Fauzan, Dan Manunggal, dan Kusuma Wardaya. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang -Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008).
- Hoddemah, dan Wiwik Saidatur Rolianah. "Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018).
- Isnaeni, Diyan. "Kekuatan Hukum Kartu BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022).
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018).
- Muljono, Bambang Eko. "Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013).
- Noviansyah, Azizi. "Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Solusi* 17, no. 3 (2019).

- Putri, Nora Eka. “Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang.” *Tingkap X*, No. 2 (2014).
- Saputra, Daniswara Demas. “Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Mencederai Pelayanan Publik Bidang Kesehatan.” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022).
- Siki, Renhat Malianus, I Gusti Nyoman Agung, dan I Nyoman Darmadha. “Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.” *Kertha Semaya* 02, No. 02 (2014).
- Slamet Kurnia, Titon. “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015).
- Sudrajat, Shinta Azzahra. “Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan.” *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022).
- Susanti, Fitri. “Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) Di Kota Magelang.” *Paradigma Multidisipliner* 3, no. 1 (2022).
- Syafi’ie, M. “Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 9, No. 4 (2016).
- United Nation, “Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies,” *HRI* 1, no. 8 (2006).
- Vandawati, Zahry Chumaida, Bambang Sugeng A.S, Fiska Silvia, Trisadini Prasastinah Usanti, dan Indira Retno Aryatie. “Kepesertaan Program Bpjs Kesehatan di Tengah Wabah Pandemic Covid-19.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2021).
- Wahyuningsih. “Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 1 (2016).
- Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Justicia Islamica* 15, No. 1 (2018).

C. LAPORAN PENELITIAN, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

- Agilga, Olla Triana. "Analisis Inpres No. 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘Ah." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Ardhanariswari, Riris, dan Tenang Haryanto. "Hak Asasi Manusia Dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003)," Universitas Jenderal Soedirman, 2006.
- Krisdayanti, Wike. "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Sayuna, Inche. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Sitohang, Desman V.E.N. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)." Universitas Indonesia, 2011.
- Yati, Rabi. "Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum." Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2021.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

E. MEDIA ONLINE

Achmad, Ady Thea Dian. "Jual Beli Tanah Harus Lampirkan Kartu JKN, Begini Bunyi Instruksinya!" 22 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jual-beli-tanah-harus-lampirkan-kartu-jkn-lt6214606588311/>, diakses pada 25 Oktober 2022.

Briantika, Adi. "JKN jadi Syarat Administrasi Publik: Antara Pemaksaan & Inovasi." 22 Februari 2022. <https://tirto.id/jkn-jadi-syarat->

administrasi-publik-antara-pemaksaan-inovasi-gph4, diakses pada 18 Februari 2023.

CNN Indonesia. “Warga soal Kartu BPJS Kesehatan buat Jual Beli Tanah: Tak Ada Kolerasi.” 22 Februari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220219205205-20-761404/warga-soal-kartu-bpjs-kesehatan-buat-jual-beli-tanah-tak-ada-kolerasi>, diakses pada 23 Januari 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Yahya Zaini Nilai Inpres No 1 Tahun 2022 Tidak Relevan.” 22 Februari 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37763/Yahya+Zaini+Nilai+Inpres+Nomor+1+Tahun+2022+Tidak+Relevan>, diakses pada 14 Oktober 2022.

Dirhantoro, Tito. “Moeldoko: Masyarakat yang Bisa Beli Tanah Seharusnya Tak Masalah Bayar Iuran BPJS Kesehatan.” 24 Februari 2022. <https://www.kompas.tv/article/264498/moeldoko-masyarakat-yang-bisa-beli-tanah-seharusnya-tak-masalah-bayar-iuran-bpjs-kesehatan>, diakses pada 11 November 2022.

Humas BPJS Kesehatan. “Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022.” 23 Februari 2022. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2203/Ini-Penjelasan-BPJS-Kesehatan-soal->, diakses pada 14 Oktober 2022.

———. “BPJS Kesehatan Mendengar 2022 Jaring Masukan tentang Pengelolaan JKN ke Depan.” 24 Juli 2022. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2360/BPJS-Kesehatan-Hearing-2022-Seeking-Feedback-on-JKN-Management-in-the-Future#:~:text=‘Tahun%2021%2C cakupan kepesertaan Program,RPJMN tahun 2022 yaitu 87%25, diakses pada 18 Februari 2023.>

———. “Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Dorong Masyarakat Sadari Pentingnya Jaminan Kesehatan.” 25 Februari 2022. [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/Inpres-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan,](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2204/Inpres-Nomor-1-Tahun-2022-Dorong-Masyarakat-Sadari-Pentingnya-Jaminan-Kesehatan, diakses pada 18 Februari 2023.) diakses pada 18 Februari 2023.

———. “Kepala BPN: Pelayanan Administrasi terkait Jual Beli Tanah Dipastikan Tak Terkendala.” 13 Maret, 2022. [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2224/Kepala-BPN-Pelayanan-Administrasi-terkait-Jual-Beli-Tanah-Dipastikan-Tak-Terkendala,](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2224/Kepala-BPN-Pelayanan-Administrasi-terkait-Jual-Beli-Tanah-Dipastikan-Tak-Terkendala, diakses pada 23 Februari 2023.) diakses pada 23 Februari 2023.

- Purnama, Iqbal Dwi. “Notaris Sebut Syarat Jual Beli Tanah Pakai BPJS Kesehatan Ribet.” 23 Februari 2022. <https://economy.okezone.com/read/2022/02/23/470/2551857/notaris-sebut-syarat-jual-beli-tanah-pakai-bpjs-kesehatan-ribet>, diakses pada 7 November 2022.
- Ramadhan, Arditho. “Aturan BPJS Kesehatan jadi Syarat Jual Beli Tanah, Mengada-ada dan Bahaya.” 19 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/07450491/aturan-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-mengada-ada-dan-bahaya>, diakses pada 27 November 2022.
- Rosana, Francisca Christy. “Logika Main Paksa Peserta BPJS Kesehatan dengan Hak Publik.” *tempo.co*, 23 Februari 2022. <https://www.google.com/amp/s/fokus.tempo.co/amp/1564025/logika-main-paksa-peserta-bpjs-kesehatan-dengan-hak-publik>, diakses pada 19 Februari 2023.
- Sibuea, Perasanta. “Angin Segar Dari Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022.” 5 Maret 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/14791/Angin-Segar-Dari-Instruksi-Presiden-No1-Tahun-2022.html>, diakses pada 3 November 2022.
- Susanto, Hery. “Ombudsman RI Respons Banyaknya Keluhan Soal BPJS Kesehatan.” 10 April 2021. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-respons-banyaknya-keluhan-soal-bpjs-kesehatan>, diakses pada 15 Maret 2023.
- Syarief, Ika Suryani. “BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan Inpres 1/2022 ‘Mewajibkan’ Kepesertaan Aktif JKN.” 22 Februari 2022. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bpjs-kesehatan-jelaskan-alasan-inpres-1-2022-mewajibkan-kepesertaan-aktif-jkn/>, diakses pada 18 Februari 2023.
- Waseso, Ratih. “BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, BPN: Untuk Optimalisasi Kepesertaan.” 22 Februari 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-bpn-untuk-optimalisasi-kepesertaan>, diakses pada 11 November 2022.